

KELAYAKAN FINANSIAL SISTEM INTEGRASI SAWIT-SAPI MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

Feasibility of the Oil Palm-Cattle Integration System through Cows-Breeding Business Credit Program

Nyak Ilham dan Handewi P. Saliem

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

Naskah masuk : 28 Juli 2011

Naskah diterima : 13 Oktober 2011

ABSTRACT

Feed is an important factor in the beef cattle business. Sources of feed not yet widely used are land areas under oil palm plantations and various wastes from oil palm plantations as well as those from palm oil processing industry. The area of oil palm plantations is an alternative as a new area for developing beef cattle farming under the livestock crop integration system. It is expected that Cattle-Breeding Business Credit Program will accelerate and encourage various stakeholders to develop these particular areas. This article aims to analyze financial feasibility of an integrated beef cattle farm business on areas under oil palm plantations with different patterns of raising cattle. The analysis is done based on previous studies related to an integrated cattle farming under oil palm plantation. Integrated cattle breeding farms with oil palm plantation provide benefits with the value of R/C ratios ranging from 1.05 to 2.84. Financially it is a feasible business to carry out with its IRR values varying from 21 to 29 percent, the values of B/C ratios between 1.35 to 2.67, and payback period of 4.91 to 6.4 years. It is expected that the government can encourage the oil palm plantation owners to be involved in the integrated cow-beef and oil palm farm business as the credit advisers and lessen banks' requirements for farmers' credit. It is also suggested that the National Land Agency to implement land certification in the plantation areas to support cattle breeding farms integrated with oil palm plantations

Key words: *program credit, palm oil-beef integration, Bengkulu*

ABSTRAK

Pakan merupakan faktor penting dalam usaha sapi potong. Sumber pakan potensial yang belum banyak dimanfaatkan adalah lahan di bawah tanaman kelapa sawit dan limbah perkebunan dan industri kelapa sawit. Kawasan perkebunan kelapa sawit, merupakan alternatif sebagai kawasan baru pengembangan sapi potong sistem integrasi tanaman ternak. Diharapkan dukungan Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi dapat mempercepat mendorong berbagai *stakeholder* untuk mengembangkan kawasan itu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial usaha sapi potong yang diintegrasikan dengan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai pola pengusahaan ternak. Analisis di lakukan berdasarkan studi sebelumnya terkait dengan integrasi usaha ternak

sapi dengan tanaman sawit. Usahatani pembibitan sapi yang diintegrasikan dengan perkebunan sawit memberikan keuntungan dengan nilai R/C berkisar 1,05 – 2,84. Secara finansial usaha tersebut layak dikembangkan dengan nilai IRR berkisar antara 21 – 29 persen, nilai B/C antara 1,35 – 2,67, dan lama pengembalian modal 4,91 – 6,4 tahun. Diharapkan pemerintah dapat lebih mendorong pihak pengusaha perkebunan terlibat sebagai avalis, fleksibilitas persyaratan perbankan dan pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan sertifikasi untuk mendukung mengembangkan usaha pembibitan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit.

Kata kunci : *kredit program, integrasi sawi-sapi, Bengkulu*

PENDAHULUAN

Impor daging sapi Indonesia dalam bentuk ternak dan daging beku terus meningkat. Pada tahun 2009, Indonesia mengimpor ternak dan daging sapi setara 142,8 ribu ton daging atau 57% kebutuhan domestik (Ditjen Peternakan, 2010). Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri maka ketergantungan pada impor terus meningkat. Upaya meningkatkan produksi daging sapi sangat ditentukan pada tiga pilar utama, yaitu pakan, manajemen dan pembibitan.

Sumber pakan pada usaha sapi potong dapat berasal dari hijauan segar yang sengaja ditanam dan tumbuh liar yang disajikan dengan sistem *cut and carry*; hijauan yang tersedia pada padang penggembalaan; hijauan berupa limbah pertanian, seperti jerami padi, kulit jagung, dan kulit ketela pohon; dan pakan non hijauan dari limbah industri pertanian, seperti dedak padi, bungkil sawit dan onggok.

Secara spasial, sumberdaya pakan dari berbagai sumber tersebut cukup tersedia di berbagai daerah. Namun manajemen pengadaannya masih belum terarah, sehingga tidak tersedia dan terdistribusi dengan harga yang murah (Ilham *et al.*, 2009). Pada usaha-usaha *feedlot*, dengan teknologi nutrisi berbagai sumberdaya pakan lokal dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pakan dengan mutu baik dan harga murah.

Kompetisi penggunaan lahan antar subsektor pertanian dan sektor lainnya mendesak usaha peternakan yang berbasis lahan dengan mengandalkan sumber pakan dari kebun rumput dan padang gembala. Berkembangnya perkebunan kelapa sawit, merupakan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk sumber pakan dan dapat dijadikan daerah pengembangan baru usaha sapi potong (Ilham *et al.*, 2009 dan Mathius, 2011). Tanaman kebun sawit tersebar pada banyak propinsi dengan luas mencapai 6,6 juta hektar. Berdasarkan indikator LQ perkebunan kelapa sawit, ada 13 propinsi di Indonesia yang memiliki nilai LQ lebih besar dari satu. Daerah itu diantaranya adalah Riau (1,75), Sumut (1,54), Jambi (1,33), Bengkulu (1,28), Kalteng (2,00), Kaltim (1,66) dan Kalsel (1,64) (SBRC, 2009).

Di Bengkulu usaha perkebunan sawit milik perusahaan swasta diusahakan terintegrasi dengan usaha sapi potong dengan memberikan keuntungan bagi usaha ternak sapi dan usaha perkebunan (Gunawan *et al.*, 2004). Permasalahannya adalah kenapa usaha sistem integrasi ternak sapi dan perkebunan kelapa sawit tidak berkembang sesuai potensi yang ada. Usaha perkebunan besar negara dan swasta masih belum banyak mengembangkannya karena meragukan sistem integrasi akan mempengaruhi produktivitas tanaman kelapa sawit. Pada usaha perkebunan rakyat mungkin faktor modal lebih menentukan. Oleh karena itu melalui program Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT) yang didukung dengan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) permasalahan permodalan dapat diatasi. Kelayakan finansial usaha integrasi sapi dan perkebunan sawit diharapkan dapat memotivasi perkembangan usaha SITT.

Terintegrasinya usaha sapi potong dan perkebunan sawit dapat mengurangi biaya lahan dan pakan serta meningkatkan kapasitas tampung sehingga skala usaha menjadi besar dan makin efisien. Efisiensi menjadi lebih baik karena menggunakan input tenaga kerja secara bersama untuk usaha sapi potong dan perkebunan kelapa sawit; mengurangi biaya tenaga kerja dan herbisida untuk membersihkan semak belukar di bawah tanaman sawit; dan memanfaatkan limbah industri kelapa sawit sebagai bahan baku pakan pada usaha penggemukan sapi potong serta pemanfaatan pupuk kandang untuk tanaman kelapa sawit. Meningkatnya efisiensi usaha akan meningkatkan kelayakan usaha dan mendorong pihak perbankan untuk mendanai usaha melalui program KUPS untuk mendukung Program PSDS 2014. Dengan demikian permasalahan lahan yang makin terbatas, pakan yang sulit tersedia, dan modal untuk pengadaan bibit sapi dapat diselesaikan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial usaha sapi potong yang diintegrasikan dengan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai pola pengusahaan ternak. Secara khusus tulisan ini bertujuan menganalisis kelayakan usahatani sapi potong dan kelayakan investasi usaha sapi potong yang diintegrasikan dengan perkebunan sawit.

SISTEM INTEGRASI TANAMAN – TERNAK

Usaha ternak sapi potong tergolong pada usaha *landbase*. Selain untuk perkandangan, lahan dibutuhkan sebagai basis untuk penyediaan pakan. Keberadaan padang penggembalaan sebagai sumber pakan dari waktu kewaktu makin menyempit. Selama tahun 2005-2009 luas padang rumput di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mengalami penurunan masing-masing 21,07 persen, 55,20 persen, dan 2,71 persen per tahun; sebaliknya di Jawa dan Bali & Nusatenggara mengalami peningkatan masing-masing 20,41 persen dan 19,41 persen (Deptan, 2009). Walaupun pada dua kawasan terakhir luas padang rumput

(penggembalaan) mengalami peningkatan, pengamatan di lapang menunjukkan bahwa penggunaannya untuk penggembalaan semakin menyempit.

Sumber pakan hijauan hasil budidaya tidak banyak berkembang karena penggunaan lahan yang bersaing untuk pangan dan usaha tersebut butuh biaya, sehingga perkembangan budidaya pakan tidak seperti tanaman pangan sebagai kebutuhan utama manusia. Hanya pada usaha skala besar seperti *feedlot* yang membudidayakan hijauan pakan. Pada umumnya usaha peternakan rakyat baik individu maupun kelompok budidaya pakan hijauan diusahakan di pinggir jalan kebun, di sekitar hutan dan di tepi jalan pedesaan.

Pada beberapa kawasan dijumpai beragam sumberdaya seperti lahan, tanaman, ternak dan masyarakat dengan berbagai tingkat perkembangannya. Pada kawasan yang menghadapi keterbatasan pakan, sudah sejak dulu petani melakukan usaha yang sinergis antara tanaman dan ternak, dimana petani memanfaatkan limbah pertanian untuk pakan ternak dan memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk bagi tanaman yang diusahakan. Pada usaha perkebunan rakyat sering dijumpai sapi digembalakan di bawah tanaman kelapa (*cocobeef*) dan tanaman karet (*rubber ruminant*). Kearifan lokal inilah yang menginspirasi dikembangkan model usaha ternak dengan konsep integrasi tanaman ternak di Indonesia

Menurut Pasandaran *et al.* (2005) sistem integrasi tanaman-ternak adalah suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu usahatani atau dalam suatu wilayah. Ciri keterkaitan antara lain adalah penggunaan sumberdaya yang beragam seperti tanaman, limbah tanaman, dan pupuk organik yang dihasilkan ternak. Hubungan sinergis yang dihasilkan memungkinkan ternak memberikan keuntungan yang tinggi per satuan input tenaga kerja disamping memberikan pupuk bagi tanaman sehingga produktivitas tanaman meningkat dan pada gilirannya pendapatan usahataninya menjadi meningkat.

Dari sisi permintaan, kebutuhan daging sapi justeru terus meningkat. Penyediaannya melalui peningkatan produksi daging membutuhkan peningkatan basis pakan. Di sisi penawaran, pergeseran penggunaan lahan yang digunakan untuk tanaman pangan, perkebunan dan pemukiman mempersempit padang penggembalaan. Dengan tekanan kedua sisi tersebut dan didukung oleh sinergi usaha tanaman ternak yang ada selama ini pada beberapa kawasan, Badan Litbang Pertanian menciptakan inovasi model sistem integrasi tanaman ternak seperti *CLS-Crops Livestock System* (Sudaratmaja dan Fagi, 2005).

Untuk meningkatkan produksi peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengembangkan pola integrasi tanaman ternak berkoordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Pola yang dikembangkan adalah: (1) Integrasi Ternak Ruminansia-Tanaman Pangan (padi dan jagung), (2) Integrasi Ternak Ruminansia-Tanaman Hortikultura (sayur-sayuran, nenas, dan pisang), (3) Integrasi Ternak Ruminansia-Tanaman Perkebunan (tebu, coklat, dan kelapa sawit) (Direktorat Budidaya Ternak

Ruminansia, 2008). Menurut Yusdja *et al.* (2003) strategi meningkatkan populasi dan produktivitas sapi potong adalah dengan melakukan konsentrasi berbagai program pada areal tertentu yang tersedia cukup pakan dengan pengawasan intensif. Salah satu areal yang potensial adalah perkebunan kelapa sawit dengan Model Integrasi Sawit-Sapi.

Dari suatu kawasan perkebunan kelapa sawit dapat dikembangkan berbagai model integrasi sawit-sapi. Kasus di Bengkulu (Ilham *et al.*, 2009), ada tiga perusahaan pola integrasi sawit-sapi yang potensial dikembangkan, yaitu: (1) integrasi sawit-sapi pola penggembalaan, (2) integrasi sawit-sapi pola kemitraan pengusaha perkebunan dengan pekebun plasma dan karyawan kebun, dan (3) integrasi sawit-sapi pola kelompok petani pekebun sawit. Berikut diuraikan lebih rinci masing-masing pola tersebut.

INTEGRASI SAWIT-SAPI POLA PENGEMBALAAN

Lahan di bawah tanaman kelapa sawit pada usaha perkebunan kelapa sawit ditumbuhi rerumputan, leguminosa dan semak yang dapat dijadikan pakan ternak. Hamparan lahan tersebut berpotensi dijadikan tempat usaha integrasi sapi-sawit dengan pemeliharaan sapi pola penggembalaan. Agar kapasitas tampung lahan di bawah tanaman kelapa sawit optimal, maka dibutuhkan kawasan perkebunan kelapa sawit yang luas. Di Indonesia, pada umumnya areal usaha perkebunan Negara/swasta relatif luas.

Berikut disajikan kasus usaha integrasi perkebunan sawit dan sapi potong yang dipelihara dengan pola penggembalaan di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Sluma Propinsi Bengkulu. Di Kabupaten Seluma terdapat usaha kebun sawit rakyat sekitar 25.000 ha, dan dua usaha perkebunan besar yaitu PT Agri Andalas dan PTPN.

Karakteristik Peternak dan Usaha Peternakan

Pada kasus ini usaha peternakan sapi potong dimulai tahun 2002 dengan kepemilikan awal enam ekor untuk usaha pembibitan. Dalam perkembangannya usaha ini melakukan pembelian dan penjualan sapi; bahkan pernah menerima program pemerintah (Siska: sistem integrasi sapi-kelapa sawit) sebanyak dua ekor. Usaha terus berkembang hingga pada tahun 2009 sapi yang diusahakan berjumlah 93 ekor. Bagi peternak usaha sapi potong merupakan usaha utama yang berkontribusi sekitar 70 persen dari pendapatan rumah tangga. Usaha lain peternak adalah usahatani kebun dan pedagang TBS (Tandan Buah Segar) sawit dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap pendapatan rumah tangga. Luas kebun sawit yang dimiliki peternak mencapai 16 Ha yang terdiri dari 8 ha produksi dan 8 ha belum produksi.

Bangsa sapi yang dipelihara sebagian besar adalah sapi Bali (70%), selebihnya terdiri dari sapi lokal (20%) dan sapi PO (10%). Hingga saat ini tidak ada kendala untuk mendapatkan bibit sapi. Peternak dapat membeli sapi bibit di wilayah setempat. Usaha sapi potong yang dilakukan merupakan usaha mandiri. Peternak merupakan tokoh masyarakat di wilayahnya. Karena keberhasilan pada usaha sapi potong, peternak dipilih sebagai ketua Kelompok Ternak Rukun Makmur. Kelompok ini beranggota 29 peternak dengan rata-rata kepemilikan dua ekor per peternak. Pada umumnya anggota kelompok menerima sapi program pemerintah.

Pola Pemeliharaan Sapi

Lokasi usaha peternakan sapi berdampingan dengan perkebunan sawit milik PT Agri Andalas. Sapi dipelihara dengan pola digembalakan. Pada pagi hari sapi dilepas di perkebunan sawit PT Agri Andalas dan sore hari digiring kembali masuk kawasan kandang. Kawasan kandang bukan merupakan bangunan tetapi hamparan lahan tempat sapi bermalam yang dipagar kawat duri. Lokasi kawasan kandang berdampingan langsung dengan kawasan kebun PT Agri Andalas. Dengan kondisi demikian biaya kandang, tenaga kerja dan pakan menjadi sangat murah.

Berdasarkan pengalaman peternak, untuk penggembalaan 90 ekor sapi tanpa menimbulkan kerusakan tanaman dan tanah perkebunan dibutuhkan luas lahan perkebunan sawit 50 ha, atau dua ekor per hektar. Pola gembala ini mengandalkan pakan hanya dari rumput alam yang tumbuh di bawah tanaman perkebunan dan memakan daun sawit dari pelepah hasil pemangkasan tanaman sawit yang diletakkan di bawah tanaman. Perkawinan sapi dengan pola gembala ini menggunakan kawin alam. Umumnya induk sapi beranak setahun sekali. Jika ada induk yang waktu jarak beranak lebih setahun maka segera diafkir dan dijual sebagai ternak potong. Dengan manajemen demikian biaya perkawinan dan biaya kesehatan menjadi minimal. Di Kecamatan Air Periukan terdapat juga satu usaha sapi potong lain dengan skala sekitar 100 ekor milik usaha perkebunan PT. Ratu Agung. Dengan dua kasus ini, sebenarnya usaha sapi potong yang diintegrasikan dengan sawit dapat dikembangkan di kawasan perkebunan sawit di Indonesia.

Input Produksi

Usaha sapi pola penggembalaan dilakukan dengan biaya produksi yang relatif kecil karena tidak mengeluarkan biaya pakan. Tenaga kerja yang digunakan dua orang, seorang merupakan tenaga kerja luar keluarga sebagai penggembala dengan kegiatan melepas sapi ke lahan perkebunan pada jam 06.00 pagi, mengawasi pada siang hari dan menggiring sapi pulang ke kandang pada jam 15.00 sore. Seorang lagi tenaga kerja dalam keluarga adalah pemilik ternak yang bertindak sebagai pengawas dengan waktu kerja dua jam per hari.

Selama ini pihak perkebunan tidak pernah keberatan dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat penggembalaan sapi di lahan kebun. Justru saling menguntungkan karena pihak perkebunan mendapat pupuk kandang dari kotoran sapi dan mampu mengendalikan semak di lahan perkebunan dengan biaya lebih sedikit dan tidak menggunakan herbisida. Biaya yang dikeluarkan peternak hanya untuk obat-obatan, vitamin dan kawat duri untuk memagari kawasan kandang. Pola penggembalaan mampu menurunkan biaya pengendalian gulma tanaman perkebunan antara 32-73 persen dibandingkan tanpa penggembalaan (Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, 2008).

Hasil Produksi

Walaupun merupakan usaha pembibitan hingga saat ini peternak belum pernah menjual sapi bibit. Bibit yang dihasilkan digunakan untuk pengembangan populasi. Sapi yang dijual berupa sapi jantan dan betina afkir. Namun jika ada permintaan khusus sapi bibit tetap dilayani. Penjualan secara reguler dan dalam jumlah besar dilakukan saat hari raya Idul Fitri dan Idul Qurban. Penjualan dilakukan langsung dengan cara mengantar ke Pedagang/Pejagal di Kota Bengkulu. Peternak tidak melakukan penjualan sendiri karena masih belum menguasai pasar sapi. Kecuali saat lebaran menjual daging dari pemotongan sapi sendiri sebanyak 2-3 ekor.

Analisis Finansial

Agar usaha pola ini dapat dikembangkan perlu diketahui tingkat kelayakan usaha secara finansial. Analisis finansial dilakukan berdasarkan kondisi eksisting kasus di Sluma Bengkulu. Jika usaha ini layak secara finansial maka pihak pemilik modal seperti investor, perusahaan perkebunan dan perbankan, diharapkan bersedia berinvestasi untuk mengembangkan usaha pembibitan seperti ini. Jika usaha perbibitan dengan biaya minimal ini berkembang dapat mengatasi masalah industri peternakan sapi potong nasional terutama untuk menghasilkan bibit.

Hasil analisis finansial dengan skala pemilikan 105 ekor sapi, menggunakan asumsi sebagai berikut: (a) perbandingan sapi pejantan dan betina 1:20; (b) masa produksi induk sapi hingga delapan kali beranak; (c) jarak melahirkan setahun sekali; (d) panen pedet 80 persen dari jumlah induk; discount factor yang digunakan 14%; karena usaha pembibitan berdasarkan kasus, tidak diberikan pakan tambahan dan (e) rasio lahir anak jantan dan betina 50:50. Hasil analisis finansial dengan dua skenario: (i) hanya menghitung satu tenaga kerja yaitu penggembala sapi sebagai tenaga kerja luar keluarga dan (ii) menggunakan dua tenaga kerja yang terdiri dari satu pemilik sebagai pengawas dan satu tenaga kerja penggembala. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 1 dan rincian masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 1a dan 1b. Usaha SITT sapi sawit pola penggembalaan dengan dua skenario layak dikembangkan.

Tabel 1. Kelayakan Usaha SITT Sapi Sawit Pola Pengembalaan di Kabupaten Sluma Provinsi Bengkulu, 2009

Penggunaan Tenaga Kerja	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C	PBP (tahun)
Satu Orang	448.302.081	24	1,53	5,75
Dua Orang	583.634.815	27	2,67	5,16

Sumber: Ilham *et al.*, 2009 (diolah)

POLA KEMITRAAN PENGUSAHA PERKEBUNAN DENGAN PEKEBUN PLASMA DAN KARYAWAN KEBUN

Perusahaan perkebunan memiliki karyawan untuk pemanenan TBS milik perusahaan. Perusahaan perkebunan juga melakukan kerjasama kemitraan dengan pekebun plasma. Hingga saat ini belum banyak pengusaha perkebunan besar melakukan usaha sapi potong yang terintegrasi dengan usaha perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan. Berikut disajikan kasus perusahaan perkebunan sawit swasta di Bengkulu yang melakukan usaha terintegrasi sawit-sapi pola kemitraan dengan karyawan pemanen TBS dan pekebun plasma.

Usaha pola kemitraan ini berawal dari persaingan pasar tenaga kerja di lingkungan perusahaan perkebunan setempat dan di Malaysia. Pada tahun 1990 banyak tawaran bagi tenaga kerja di sekitar perkebunan untuk bekerja di Malaysia. Tawaran tersebut merupakan ancaman bagi perusahaan perkebunan. Untuk mencegah keluarnya karyawan dari perusahaan dan kelangkaan tenaga kerja di lingkungan perusahaan, pihak perusahaan berupaya melakukan peningkatan pendapatan karyawan dan pekebun plasma. Pada tahun 1997, upaya yang dilakukan adalah menerapkan program Siska (sistem integrasi sapi dan kelapa sawit), yaitu mengintegrasikan pekerjaan pemanen/plasma dengan usaha sapi potong.

Manajemen Program Siska

Untuk menjalankan program Siska, pihak pengusaha kebun sebagai inti bertindak sebagai apalis untuk dapat memanfaatkan dana kredit program untuk usaha sapi potong karyawan pemanen dan pekebun plasma. Bahkan dengan kepedulian yang tinggi, pihak inti banyak menggunakan dana sendiri dalam mengembangkan usaha peternakan. Pada awal program setiap karyawan pemanen mendapat satu paket kredit terdiri dari tiga ekor induk dan satu sapi jantan, sedangkan untuk pekebun plasma dua ekor induk. Dengan dana yang ada, hingga tahun 2009 belum semua karyawan pemanen dan pekebun plasma terlibat program siska. Pihak perusahaan mengharapkan semua karyawan pemanen dan pekebun

plasma akan dilibatkan program siska. Untuk itu pihak perusahaan akan memanfaatkan dana KUPS.

Implementasi integrasi usaha integrasi sawit-sapi pemanen kebun sehari-hari dapat dilihat pada Tabel 2. Perkawinan sapi dilakukan secara alami. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan sangat kecil, sedangkan tenaga kerja banyak difungsikan secara ganda yaitu memanen TBS sambil mengawasi ternak yang digembala di lahan perkebunan yang sedang di panen.

Tabel 2. Aktivitas Harian Karyawan Pemanen yang Berusaha Sapi Potong di Bengkulu, 2009

No	Waktu	Aktivitas sebagai Karyawan Pemanen	Aktivitas sebagai Peternak
1	06.00 sd 11.00	Merawat kebun dan memanen buah sawit	Membiarkan sapi merumput di sekitar kawasan perawatan dan pemanenan kebun
2	11.00 sd 12.00	Istirahat	Istirahat
3	12.00 sd 15.00	Mengangkut TBS dengan gerobak sapi dari kebun ke pinggir jalan produksi	Membiarkan sapi merumput di sekitar tempat panen dan pengumpulan hasil
4	15.00 sd 16.00	Persiapan pulang	Mencari pakan tambahan dari pelepah sawit dan rumput alam dan menggiring sapi pulang ke kandang
5	16.00 sd 17.00	-	Menambat sapi di sekitar rumah
6	17.00 sd 18.00	-	Memasukkan sapi ke kandang dan memberikan pakan tambahan

Sumber: Ilham *et al.*, 2009.

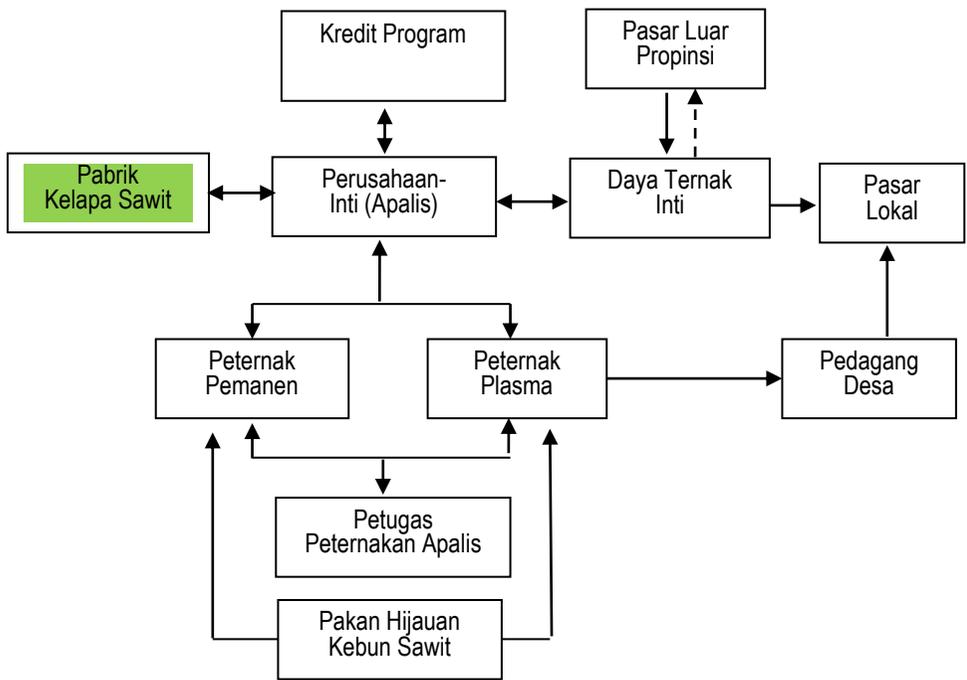
Pemasaran Hasil Usaha Sapi Potong

Untuk menampung penjualan sapi milik pemanen/plasma, pihak perusahaan memiliki unit usaha sapi potong yang dikelola pada Unit Daya Ternak Inti. Sapi-sapi tersebut digunakan sebagai sumber bibit sapi bagi karyawan pemanen dan pekebun plasma yang akan ikut program. Jika tidak mencukupi, pihak inti membeli dari luar daerah seperti NTB.

Untuk memudahkan administrasi pengembalian kredit, karyawan pemanen dan pekebun plasma diharuskan menjual sapi kepada pihak inti. Namun khusus untuk plasma, karena alasan lokasi yang jauh antara kebun plasma dan Unit Daya Ternak Inti, mereka dibolehkan menjual sapi secara bebas dengan syarat sudah melunasi pinjaman modal usaha Program Siska. Penentuan harga jual dari peternak kepada pihak inti berdasarkan pada berat badan dengan harga merujuk ke pasar setempat. Pembayaran dilakukan seminggu setelah

penimbangan. Jangka waktu tersebut terjadi karena penjadwalan penjualan antar afdeling (lokasi kebun) yang berjauhan sehingga dilakukan bergilir untuk memudahkan penanganan.

Pihak inti juga menjual sapi ke pengusaha baso dan pedagang pemotong di sekitar Bengkulu. Di masa datang direncanakan sapi yang dihasilkan akan dijual untuk kebutuhan luar propinsi Bengkulu. Gambaran model usaha integrasi sawit-sapi pada perusahaan perkebunan sawit dengan pemanen dan plasma dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Kemitraan Perusahaan/Inti dan Pemanen/Plasma dalam Pola Integrasi Sawit-Sapi di Bengkulu, 2009

Sumber: Ilham *et al.*, 2009

Manfaat Integrasi Sapi dan Sawit

Program Siska Pola Kemitraan melibatkan pihak perusahaan sebagai inti, karyawan pemanen dan pekebun plasma. Luas kebun sawit perusahaan 8902 ha yang terdiri dari 6000 ha pada kawasan afdelling I – X dan 2902 ha di kawasan afdelling XI dan XII. Masing-masing karyawan pemanen bekerja pada areal 15 ha kebun sawit. Perusahaan memiliki kebun plasma perusahaan seluas 16 ribu hektar, masing-masing pekebun plasma menguasai 1-2 hektar kebun sawit.

Bagi perusahaan perkebunan, integrasi sapi pada kebun sawit dapat memanfaatkan sapi jantan sebagai penarik gerobak angkutan TBS sehingga produktivitas perkebunan meningkat. Peningkatan tersebut berasal dari meningkatnya jumlah panen/hari/tenaga kerja dan usia kerja produktif pemanen naik dari 35 tahun menjadi 40 tahun.

Manfaat program siska bagi karyawan pemanen dan pekebun plasma adalah meningkatnya pendapatan yang bersumber dari hasil panen TBS yang makin produktif dan hasil penjualan sapi. Banyak pemanen sudah mampu membeli kebun sawit dengan uang hasil program siska sebagai cadangan usaha saat pensiun dari perusahaan perkebunan sawit. Pemanen yang sudah lama berusaha ternak saat ini memiliki sapi minimal 15 ekor. Sebagian sapi sudah dijual untuk membiayai sekolah anak dan membeli kebun.

Analisis Usahaternak

Modal usaha membeli bibit sapi, pengobatan sapi dan pembinaan teknis yang digunakan karyawan pemanen dan pekebun plasma pada usaha sapi potong mereka berasal dari pihak perusahaan perkebunan sawit. Hasil analisis finansial pada dua peternak yang memiliki sapi 13 ekor dan 18 ekor menunjukkan bahwa usaha pembibitan sapi potong memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Analisis finansial didasarkan atas biaya yang diperhitungkan seperti tenaga kerja keluarga, pakan rumput, sewa lahan untuk tanaman rumput maupun untuk kandang, memberikan pendapatan pertahun masing-masing Rp 11,23 juta dan Rp 44,80 juta per siklus per peternak. Sementara itu, pendapatan bulanan mampu memberikan hasil Rp 0,94 juta dan Rp 3,73 juta dengan nilai R/C 2,12 dan 2,10 (Tabel 3 dan Tabel 4).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa usaha budidaya ternak sapi potong dengan pola pemanen dengan skala penguasaan ternak 13 dan 18 ekor per peternak, memberikan pendapatan yang cukup walau di lakukan secara sampingan. Artinya disamping melakukan panen dan perawatan tanaman sawit sebagai pekerjaan utama juga sebagai peternak yang melakukan budidaya ternak sapi potong. Akan tetapi akan lebih baik apabila volume penguasaan ternak tersebut bisa lebih ditingkatkan. Disamping efisiensi curahan tenaga kerja dalam pengelolaan ternak akan lebih efisien, juga pendapatan yang dihasilkan akan lebih baik. Mengingat dengan sistem pemeliharaan semiintensif dengan sistem gembala pada siang hari dan kandang pada malam hari, maka alokasi tenaga kerja akan lebih efisien apabila jumlah ternak yang dibudidayakan dapat ditingkatkan.

Pada usaha pembibitan sapi potong dengan pola usaha inti plasma merupakan kerjasama antara pekebun plasma dengan perusahaan kondisinya hampir sama dengan pola kerja sama antara karyawan pemanen dengan perusahaan tersebut diatas. Pembedanya hanya domisili usaha. Kalau karyawan pemanen umumnya berdomisili di lingkungan pabrik dan kebun sawit perusahaan, sedangkan pekebun plasma berdomisili di luar pabrik, namun sama-sama bergerak dalam usaha kelapa sawit.

Tabel 3. Analisis Usaha Budidaya Sapi Potong Pola Kemitraan Pemanen dan Perawat Tanaman Sawit di Bengkulu Utara, Bengkulu, 2009

Uraian	Nilai (Rp) ¹⁾
A. Nilai sapi yang dibeli (4 ekor)	(83,54)
B. Biaya yang dikeluarkan	
B1. Pakan	(0,25)
1. Rumput	
2. Dedak (selama sebulan)	
Total B1 (semua biaya dinilai)	
B2 Obat-obatan dan vaksin (13 ekor)	(3,63)
B3 TK Dalam Keluarga (48,75 HOK)	(12,14)
B4 Biaya lain: Nilai alat kandang	(0,44)
Total Biaya (semua biaya dinilai = A+B)	10 036 250
Total Biaya (hanya biaya tunai=A+B2+B4)	8 792 500
C. Penerimaan	
1. Nilai sapi yang dijual (657 kg)	16 769 000
2. Nilai produk sampingan tenaga kerja (0,5 x 360 HOK)	4 500 000
3. Total	21 269 000
D. Keuntungan: D = C – (A + B)	
D (semua biaya dinilai)=(C3-B-A)	11 232 750
D'(hanya biaya tunai)=(C3-B'-A)	12 476 500
R/C (semua biaya dinilai)	2,12
R/C'(hanya biaya tunai)	2,42

1) Angka dalam kurung adalah struktur biaya terhadap total biaya (%)

Sumber: Ilham *et al.*, 2009.

Tabel 4. Analisis Diperhitungkan Usaha Budidaya Ternak Sapi Potong Pola Kemitraan Pemanen dan Perawat Tanaman Sawit di Bengkulu Utara, Bengkulu, 2009

Uraian	Nilai (Rp) ¹⁾
Lama Usaha 12 bulan, Skala Usaha 18 ekor	
Biaya Usaha:	
1. Pengadaan bibit/bakalan	(78,62)
2. Biaya pemeliharaan:	
a. Biaya Inseminasi	(0,49)
b. Biaya pakan	(0,71)
c. Biaya Obat2an	(0,22)
d. TK dalam keluarga	(16,89)
4. Biaya penyusutan Kandang dan alat	(0,61)
5. Sewa lahan/tahun	(2,46)
Total Biaya Usaha	40 703 000
Penerimaan Usaha 18 ekor sapi:	
1. Nilai tambah ternak selama setahun	17 000 000
2. Nilai jual ternak	68 000 000
3. Nilai pupuk kandang	500 000
Total Penerimaan	85 500 000
Keuntungan Usaha	44 798 000
R/C	2.10

1) Angka dalam kurung adalah struktur biaya terhadap total biaya (%)

Sumber: Ilham *et al.*, 2009.

Hasil analisis usahaternak pola inti plasma menunjukkan bahwa hasil bersih yang didapatkan secara riil adalah Rp 5,41 juta per peternak pertahun melalui sistem usaha pembibitan dengan jumlah ternak yang dipelihara sebanyak 9 ekor. Sementara dilihat dari pendapatan bulanan sebesar Rp 0,45 juta dengan R/C 2,94 (Tabel 5). Analisis usaha dengan memperhitungkan ongkos tenaga kerja keluarga, pakan, sewa lahan untuk penanaman rumput maupun untuk kandang, maka besarnya pendapatan per siklus adalah sebesar Rp 0,91 juta per tahun. Dilihat dari besarnya pendapatan per bulan maka besarnya pendapatan yang bisa di terima peternak adalah sebesar Rp 75.833 dengan nilai R/C rasio 1,12.

Dengan besaran angka-angka pendapatan tersebut diatas baik dihitung berdasarkan angka pengeluaran riil maupun diperhitungkan, maka usaha budidaya ternak sapi potong yang dikelola dengan pola inti plasma dengan sembilan ekor ternak sapi hasilnya masih relatif terbatas. Hal ini dapat dikatakan bahwa usaha budidaya pembibitan sapi potong dengan pola inti plasma dengan skala usaha sembilan ekor sapi tampaknya masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal volume penguasaan ternak, agar tenaga kerja keluarga yang di curahkan lebih efisien.

Tabel 5. Analisis Usaha Pembibitan Sapi Potong Pola Plasma Bengkulu Utara-Bengkulu, 2009

Uraian	Nilai (Rp) ¹⁾
Lama Usaha: 12 bln, Skala usaha 9 ekor	
A. Nilai sapi yang dibeli (1 ekor)	(30,87)
B. Biaya yang dikeluarkan	
1. Obat dan Vaksin (9 ekor)	(3,46)
2. TK dalam keluarga (180 HOK)	(61,74)
3. Nilai alat kandang	(3,94)
Total Keseluruhan biaya:	
Semua biaya dinilai=A+B	7 289 000
Hanya biaya tunai=A+B1+B3	2 789 000
C. Pendapatan Kotor	
1. Nilai sapi yang dijual (1 ekor)	4 700 000
2. Nilai tambah ternak(31 000 000-27 500 000)	3 500 000
4.Total	8 200 000
D. Keuntungan: D = C – (A + B)	
D (semua biaya dinilai=C4-B-A)	911 000
D'(hanya biaya tunai=C4-A-B')	5 411 000
R/C= C/(A+B)	
R/C (semua biaya dinilai=C4/(B+A))	1,12
R/C'(hanya biaya tunai=(C4/B'+A))	2,94

1) Angka dalam kurung adalah struktur biaya terhadap total biaya (%)

Sumber: Ilham *et al.*, 2009.

Analisis Finansial

Agar usaha ini dapat dikembangkan perlu dilakukan analisis kelayakan usaha. Jika usaha ini layak secara finansial, pihak pemilik modal seperti investor, perusahaan perkebunan dan perbankan, diharapkan bersedia berinvestasi pada usaha ini. Jika usaha perbibitan dengan biaya minimal ini berkembang dapat mengatasi masalah industri peternakan sapi potong nasional terutama untuk menghasilkan bibit. Analisis ini digunakan dengan fakta yang dijumpai pada kasus pola Kemitraan Perusahaan dengan Kelompok Pemanen sebanyak 20.

Hasil analisis finansial kelompok pemanen 20 orang pada perusahaan perkebunan dengan skala pemilikan masing-masing 30 ekor ekor sapi didasarkan pada asumsi sebagai berikut: (a) perbandingan pejantan dan betina sekitar 1:20; (b) masa produksi delapan kali beranak; (c) jarak melahirkan setahun sekali; (d) panen pedet 80 persen dari jumlah induk; dan (e) rasio lahir anak jantan dan betina 50:50. Hasil analisis finansial dengan dua skenario: (i) memperhitungkan biaya tenaga kerja dan (ii) tidak memperhitungkan biaya tenaga kerja. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 6 dan rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 2. Usaha pola pemanen layak dikembangkan.

Tabel 6. Kelayakan Usaha SITT Sapi Sawit Pola Pemanen Kebun Sawit di Perusahaan di Bengkulu Utara-Bengkulu, 2009

Biaya Tenaga Kerja	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C	PBP (tahun)
Dihitung	2.390.164.288	23	1,47	5,91
Tidak Dihitung	3.743.491.622	29	1,85	4,91

POLA KELOMPOK PETANI PEKEBUN SAWIT

Karakteristik Usaha

Pada kasus usaha pembibitan, sebagai anggota kelompok dengan pemilikan delapan ekor, peternak mampu mengusahakan usaha sapi potong dengan sukses. Dari hasil usaha sapi potong peternak mampu membeli lahan pekarangan dan mampu membuat rumah. Dari usaha ternak yang sukses tersebut, yang bersangkutan mendapatkan bantuan tabung untuk pemrosesan biogas yang bahan bakunya berasal dari kotoran ternak.

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak utama adalah mengandalkan rumput alam yang masih cukup melimpah di daerahnya serta limbah pertanian seperti jerami padi, jerami jagung dan limbah pertanian lainnya. Untuk melengkapi kebutuhan pakan juga digunakan bahan solid limbah industri sawit dari perusahaan kelapa sawit terdekat.

Sebenarnya peternak ingin memperbesar skala usaha dengan memperbanyak ternak sapi yang dipeliharanya. Akan tetapi peternak masih sulit untuk mendapatkan pinjaman bank. Permasalahan lain yang dirasakan adalah sulitnya mencari induk sapi jenis PO yang berkualitas baik di Bengkulu. Untuk mendapatkan sapi PO induk yang berkualitas baik, harus mencari ke Lampung.

Hasil utama dari budidaya ternak sapi yang merupakan usaha pembibitan adalah pedet hasil IB atau kawin alam. Bangsa sapi yang dipelihara secara keseluruhan adalah bangsa sapi PO. Pemasaran hasil ternak terutama pedet maupun jantan hasil penggemukan tidak sulit. Dalam proses penjualan peran kelompok sangat dominan. Aturan main dalam kelompok berkaitan dengan penjualan ternak milik anggota harus dilakukan secara lelang yang dilakukan oleh kelompok. Dengan cara jual demikian, harga yang diterima peternak bisa menjadi relatif lebih tinggi.

Analisis Usahatani Ternak

Kasus pada anggota kelompok ternak dengan pemilikan sapi lima ekor menunjukkan bahwa usaha sapi potong yang diusahakan di daerah berdekatan dengan perkebunan sawit memberikan keuntungan dengan nilai R/C 1,3 untuk penerimaan dan pembiayaan tunai. Disamping itu usaha ini juga dapat memberikan pupuk kandang untuk diolah menjadi kompos dan biogas. Rincian analisis usahatani ternak petani kebun sawit dapat dilihat pada Tabel 7.

Analisis Finansial

Potensi petani kebun sawit untuk mengusahakan sapi potong sangat besar. Hal itu disebabkan oleh ketersediaan pakan dan tenaga kerja keluarga. Masalahnya jumlah sapi yang mereka usahakan relatif terbatas. Pemanfaatan KUPS dengan melibatkan apalis seperti perusahaan perkebunan merupakan alternatif untuk memanfaatkan dana KUPS untuk pengembangan industri sapi lokal. Sapi yang cocok dikembangkan dengan potensi pakan dari perkebunan sawit adalah sapi Bali, sapi SO/PO dan sapi lokal. Bangsa sapi ini tahan terhadap tekanan dan reproduksinya baik dibandingkan sapi persilangan yang membutuhkan perawatan lebih intensif.

Jika petani kebun yang bergabung dalam kelompok diberi kesempatan mendapat bantuan modal sehingga dapat memelihara sapi 30 ekor maka pendapatan mereka akan meningkat, populasi dan produksi daging sapi meningkat dan ketahanan pangan nasional juga meningkat. Dengan jumlah 30 ekor, sebagai petani pekebun dibutuhkan bantuan chopper untuk mencincang daun dan pelepah sawit sebagai pakan tambahan sapi di kandang. Selain itu untuk pemanfaatan pupuk kandang, pengadaan unit pembangkit biogas utamanya untuk kebutuhan petani perlu diadakan, walaupun belum semua petani mau memanfaatkan gas dari kotoran sapi sehingga perlu penyuluhan lebih lanjut.

Tabel 7. Analisis Usaha Pembibitan Sapi Potong Joyo Sukar Sluma-Bengkulu, 2009

Uraian	Nilai (Rp) ¹⁾
Lama Usaha 12 bulan, skala usaha 5 ekor	
A. Nilai sapi yang dibeli (1 ekor)	(75.82)
B. Biaya yang dikeluarkan	
1. Dedak milik sendiri (satu bulan)	(0.21)
2. Inseminasi Buatan	(0.38)
3. TK dalam keluarga (150,75 HOK)	(19.05)
4. Nilai alat kandang	(2.77)
5. Penerangan listrik (12 bulan)	(1.77)
Total semua biaya dinilai	11870250
Total hanya biaya tunai	9584000
C. Pendapatan Kotor	
1. Nilai sapi yang dijual (2 ekor= (7+4)juta	11000000
2. Nilai tambah ternak	1500000
Total	12500000
D. Keuntungan: D = C – (A + B)	
D (semua biaya dinilai)	629750
D'(hanya biaya tunai)	2916000
R/C= C/(A+B)	
R/C (semua biaya dinilai)	1.05
R/C'(hanya biaya tunai)	1.30

1) Angka dalam kurung adalah struktur biaya terhadap total biaya (%)

Sumber: Ilham *et al.*, 2009.

Berdasarkan analisis finansial, usahatani ternak yang dilakukan petani kebun sawit layak untuk dikembangkan. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kelayakan Usaha SITT Sapi Sawit Pola Kelompok Petani Kebun Sawit, Bengkulu, 2009

Biaya Tenaga Kerja	NPV (Rp)	IRR (%)	B/C	PBP (tahun)
Dihitung	1.930.164.288	21	1,35	6,40
Tidak Dihitung	3.283.491.622	26	1,68	5,30

PROGRAM KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI KUPS

Permodalan masih menjadi salah satu permasalahan pokok dalam pembangunan pertanian. Untuk mendukung pembangunan pedesaan yang didominasi sektor pertanian, Pemerintah meluncurkan berbagai kredit program dan bantuan modal untuk pelaku usaha pertanian di pedesaan. Bantuan tersebut

dapat berupa: (1) subsidi bunga, dalam bentuk program Kredit Bimas, Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS); (2) kredit yang mendekati komersial, dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), dan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K); (3) bantuan langsung, dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung pada Masyarakat (BLM); (4) Bantuan Bergulir, dalam bentuk Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK); dan (5) Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP), dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (Ashari, 2008 dan Ashari, 2006). Diakui bahwa beberapa kredit program telah mencapai tujuannya, namun ada indikasi kinerja tidak memuaskan, karena: rendahnya tingkat pelunasan kredit, rendahnya moralitas aparat pelaksana, dan rendahnya tingkat mobilitas dana masyarakat (Ashari, 2006).

Berdasarkan pengalaman selama ini, pihak perbankan makin memperketat dalam penyaluran kredit, terutama pada sektor pertanian dengan tingkat risiko tinggi. Akibatnya realisasi kredit program pada sektor pertanian cenderung rendah. Padahal disadari bahwa pembangunan perekonomian pedesaan masih menghadapi kendala permodalan para pelaku usaha. Untuk memecahkan masalah tersebut Lembaga Keuangan Mikro memiliki potensi dan keunggulan sebagai sumber pembiayaan masyarakat petani/pedesaan karena komitmen yang kuat dalam memberdayakan usaha mikro, prosedur yang lebih fleksibel dan lokasinya yang dekat dengan daerah pedesaan (Ashari, 2006). Namun besarnya plafond dari LKM ini relatif kecil yaitu di bawah Rp 50 juta. Mengambil pelajaran dari LKM berarti diperlukan fleksibilitas dalam prosedur pemanfaatan dana kredit program.

Untuk pengembangan usaha pembibitan sapi potong dibutuhkan modal besar. Siklus produksi usaha pembibitan sapi potong relatif panjang, sehingga pengembalian modal pada usaha pembibitan relatif lebih lama. Selain itu sebagai industri biologis, usaha pembibitan sapi potong memiliki risiko tinggi. Dilema tersebut mendorong pemerintah meluncurkan Program KUPS yang dapat diberikan dalam jumlah besar dengan tingkat bunga ditanggung nasabah lima persen dan ditanggung pemerintah sebagai subsidi sebesar delapan persen. Walaupun telah diupayakan dengan bunga yang rendah, pihak bank tetap selektif dalam penyaluran dana tersebut.

Berdasarkan Permentan 40/2009 (Menteri Pertanian, 2009), tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS, pelaksanaan KUPS akan dilakukan selama 10 tahun sejak 2009-2018 dan perlunasan kredit paling lama selama enam tahun. Hasil analisis finansial yang diutarakan sebelumnya menunjukkan bahwa usaha pembibitan dengan berbagai pola menghasilkan nilai IRR antara 21-29 persen sehingga sangat layak menggunakan KUPS dengan bunga lima persen. Demikian pula *pay back period* usaha ini antara 4,91 – 5,91 sehingga memenuhi syarat KUPS yaitu maksimum enam tahun.

Untuk mengembangkan usaha berbasis kerakyatan, KUPS tidak hanya dapat diakses oleh pengusaha tetapi juga koperasi, gabungan kelompok peternak dan kelompok peternak. Peternak yang bermaksud mengakses KUPS harus: (1) membentuk kelompok dengan jumlah anggota minimal 20 orang, terdiri atas peternak yang mampu membayar kredit dengan bunga 5% per tahun; (2) kelompok didaftarkan pada Dinas Peternakan Kota/Kabupaten setempat dan mengajukan rekomendasi kepada Dinas setempat untuk menjadi peserta KUPS; dan (3) kelompok peternak berupaya meyakinkan kepada bank melalui berbagai cara/langkah (Menteri Pertanian, 2009).

Berdasarkan Pedoman KUPS, persyaratan yang harus dipenuhi kelompok peternak adalah: (1) memiliki organisasi dan pengurus yang aktif, (2) memiliki anggota yang terdiri dari peternak, (3) terdaftar pada dinas kabupaten/kota setempat, (4) memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank, (5) memiliki aturan kelompok/gabungan kelompok yang disepakati anggota, (6) memenuhi prosedur baku produksi bibit, (7) bermitra dengan perusahaan atau koperasi, dan (8) memperoleh rekomendasi dari dinas kabupaten/kota. Plafon kredit untuk usaha pembibitan sapi potong per pelaku usaha, dalam hal ini kelompok peternak maksimum Rp 65,124 miliar.

Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan pada Kredit Program KUPS diharapkan peternak yang tergabung dalam gapoknak/poknak, koperasi dan bermitra dengan pengusaha mampu mengakses kredit bersubsidi tersebut untuk mengembangkan usaha. Namun demikian untuk mensukseskan program tersebut diperlukan pembinaan dan pendampingan dari berbagai instansi terkait agar penerimaan, pemanfaatan dan pengembalian dana kredit berjalan sesuai pedoman.

Data dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga bulan Mei 2011, jumlah pemohon KUPS yang masuk ke Direktorat Jenderal Peternakan sebanyak 143 usulan, terdiri atas 74 perusahaan dan 59 koperasi. Usulan dari kelompok tidak tersedia data, karena rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan masing-masing provinsi. Dari 133 usulan tersebut, 48 usulan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan, 22 usulan dalam proses rekomendasi (verifikasi berkas dan/atau lapangan), 8 usulan mundur, 4 usulan ditolak karena tidak sesuai dengan pedoman KUPS, dan 51 usulan dikembalikan kepada pemohon karena belum memenuhi persyaratan. Dari 48 usulan yang telah memperoleh rekomendasi tersebut sebanyak 15 usulan telah akad kredit, 1 pelaku usaha ditolak dan 32 usulan masih dalam proses dengan bank.

Data terbaru pada Juli 2011, dari plafon kredit senilai Rp 3,88 Triliun baru terealisasi sekitar Rp 0,33 Triliun atau sekitar 8,43 persen. Realisasi tersebut terdistribusi pada 100 Kelompok Peternak bernilai Rp 92,2 miliar, sembilan koperasi bernilai Rp 62,3 miliar, dan delapan Perusahaan bernilai Rp 169, 2 miliar tersebar pada sembilan provinsi (Jatim, Jateng, DIY, Jabar, Sumut, Sumbar, Lampung, Sulsel dan Bali) melalui sembilan bank penyalur (BRI, BNI, Bank

Mandiri, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank BPD DIY, Bank Nagari, Bank Sumut, Bank BPD Bali). Penyaluran melalui Bank BPD NTB dan Bukopin penyalur belum ada realisasi.

Dari angka-angka tersebut mengindikasikan masih banyak kendala yang dihadapi dalam merealisasikan dana KUPS. Pada beberapa provinsi rangkaian kegiatan Program KUPS masih dalam taraf sosialisai kepada instansi terkait baik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun pihak perbankan seperti kasus di Kabupaten Aceh Besar. Kendala lain adalah masih banyak kelompok peternak yang belum memiliki badan hukum yang merupakan salah satu syarat kelompok penerima KUPS dan secara teknis usaha yang akan dilakukan tidak layak.

Pada tahap selanjutnya terkait dengan aturan pada perbankan yang mengutamakan kemandirian pengembalian dan keuntungan usaha. Pada tahap ini banyak dijumpai secara administrasi sudah memenuhi syarat dan secara teknis sudah layak, namun masih belum *bankable* yang umumnya disebabkan belum memiliki agunan sebagai penjamin. Umumnya aset berupa lahan dan bangunan yang dimiliki para calon penerima belum memiliki sertifikat dan walaupun bersertifikat nilai agunan masih belum mencukupi. Akibatnya beberapa calon menerima dana lebih rendah dari yang diajukan.

KEBIJAKAN ANTISIPATIF PENGEMBANGAN INTEGRASI SAPI-SAWIT DI INDONESIA

Faktor utama yang menjadi kendala pencairan dana Program KUPS adalah persyaratan agunan sehingga walaupun secara teknis usaha pembibitan layak dikembangkan, namun karena belum memenuhi syarat perbankan maka banyak calon peserta program (kelompok, koperasi dan perusahaan) masih belum *bankable*. Sebenarnya aset calon peserta program tersedia, seperti aset lahan dan rumah. Namun pada umumnya kedua aset tersebut belum memiliki sertifikat sehingga statusnya sebagai agunan menjadi kurang bernilai. Agar kedua aset tersebut mempunyai nilai sebagai agunan diperlukan program sertifikasi aset. Upaya ini pada beberapa daerah sudah dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Program Prona/Proda (Program Agraria Nasional/Daerah). Diharapkan pihak Dinas Peternakan Daerah dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta dapat mengkordinasikan Program Prona/Proda dengan pihak BPN untuk mendukung Program KUPS.

Dalam aturan perbankan, ternak yang merupakan barang berharga dalam usaha pembibitan merupakan unit industri biologis setingkat mesin pada industri teknis, namun tidak dapat dijadikan sebagai aset yang dapat dijadikan agunan. Kedepan diharapkan ada kesepakatan dalam aturan penilaian aset bahwa sapi bibit pada usaha pembibitan masuk kategori aset yang berbeda pada sapi bakalan pada usaha penggemukan sapi.

Dari 11 bank penyalur kredit KUPS, ada tujuh bank yang merupakan bank daerah, yaitu: Bank Jatim, Bank Jateng, Bank BPD DIY, Bank Nagari, Bank Sumut, Bank BPD Bali, Bank BPD NTB. Bank Daerah ini diharapkan lebih dekat dengan nasabah dan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan perannya membangun daerah. Persyaratan dan sistem pengembalian terkait dengan Program KUPS agar dibuat menjadi lebih fleksibel dan dapat melibatkan berbagai instansi di daerah sebagai lembaga penjamin (avalis). Lembaga penjamin tersebut diantaranya adalah perusahaan perkebunan swasta, perusahaan perkebunan pemerintah, BUMN/BUMD di daerah, dan lembaga penjamin kredit.

PENUTUP

Usahatani pembibitan sapi yang diintegrasikan dengan perkebunan sawit yang diusahakan dengan pola penggembalaan, pola kemitraan pemanen/plasma-pengusaha, dan pola kelompok petani kebun sawit memberikan keuntungan dengan nilai R/C berkisar 1,05 – 2,84. Usaha tambahan dari usaha sapi potong ini memberikan tambahan pendapatan bagi petani/pemanen kebun sawit yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan kondisi yang ada, usaha pembibitan sapi potong yang terintegrasi dengan perkebunan sawit yang diusahakan dengan pola penggembalaan, pola kemitraan dan pola kelompok petani kebun sawit layak secara finansial. Kriteria kelayakan tersebut terlihat dari nilai NPV lebih besar dari nol, nilai IRR berkisar antara 21 – 29 persen, nilai B/C antara 1,35 – 2,67, dan lama pengembalian modal 4,91 – 6,4 tahun.

Potensi perkebunan sawit yang luas, tersedianya dana KUPS yang didukung dengan kelayakan finansial usaha pembibitan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit hendaknya mendorong pihak pemerintah, pihak perbankan dan pihak perusahaan perkebunan meningkatkan upaya mengembangkan usaha pembibitan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit. Sesuai dengan pola pemeliharaan dan ketersediaan pakan maka bangsa sapi yang dikembangkan menggunakan sapi Bali, SO/PO, Sapi Aceh, dan sapi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keunagan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *AKP*, 4 (2): 146-164. Juni 2006. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Ashari. 2008. Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia. *AKP*, 7 (1): 21-42. Maret 2009. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

- Deptan. 2009. Statistik Pertanian 2009. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. 2008. Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Sapi. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
- Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia. 2008. Pedoman Teknis Integrasi Ternak Ruminansia-Tanaman. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Ditjen Peternakan, 2010. Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014. Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.
- Gunawan, A., D.M. Sitompul, dan B.P. Manurung. 2004. Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA) Pola Inti Plasma. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bengkulu.
- Ilham, N., Y. Yusdja, A. R. Nurmanaf, B. Winarso dan Supadi. 2009. Perumusan Model Pengembangan Skala Usaha dan Kelembagaan Usaha Sapi Potong. Kerjasama Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Departemen pendidikan Nasional, Bogor.
- Mathius, I-W. 2011. Industri Kelapa Sawit Sebagai Basis Pengembangan Sapi Potong. Paper Disampaikan pada Diskusi “Inovasi dan Pembelajaran Sistem Integrasi Sapi dan sawit Berbasis Mekanisasi Pertanian untuk Kemandirian Peternak di Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Menteri Pertanian. 2009. Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Pasandaran, E., A. Djajanegara, K. Kariyasa, dan F. Kasryno. 2005. Kerangka Konseptual Integrasi Tanaman-Ternak di Indonesia. Dalam: Integrasi Tanaman-Ternak di Indonesia. Penyunting: E. Pasandaran, A.M. Fagi dan F. Kasryno. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- SBRC. 2009. Studi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Propinsi Riau. Kerjasama antara Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor dengan Pemerintah Daerah Propinsi Riau, Bogor.
- Sudaratmaja, I G.A.K. dan A.M. Fagi. 2005. Evolusi Pengelolaan Integrasi Tanaman-Ternak. Dalam: Integrasi Tanaman-Ternak di Indonesia. Penyunting: E. Pasandara, A.M. Fagi dan F. Kasryno. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Yusdja, Y., N. Ilham, W.K. Sejati. 2003. Profil dan Permasalahan Peternakan. *FAE*, 21 (1): 44-56.